

COMMUNICATIONS

Media Global Dalam Perjuangan Perempuan Untuk Kesetaraan Gender Di Afghanistan: Analisis Komunikasi Berbasis Interseksionalitas

1* Helen Afriliyanti 2Tina Kartika

¹Student at Master Communication Science Department, Lampung University, Lampung, Indonesia

²Lecturer at Communication Science Department, Lampung University, Lampung, Indonesia

[*helenafriyanti@gmail.com](mailto:helenafriyanti@gmail.com)

ARTICLE INFO

Received on November 21, 2024

Received in revised from January 5, 2025

Accepted on January 9, 2025

Published on January 31, 2025

Keywords:

Global Media, Intersectionality, Critical Discourse Analysis, Afghan Women's Rights

How to cite this article: Afriliyanti, Helen & Tina Kartika. (2025). Media Global dalam Perjuangan Perempuan Untuk Kesetaraan Gender di Afghanistan: Analisis Komunikasi Berbasis Interseksionalitas. *Communications* 7(1), 27-56



ABSTRACT

This article examines how global media plays a role in Afghan women's struggle for gender equality, employing an intersectionality approach and Fairclough's critical discourse analysis. Since the Taliban's takeover of Afghanistan in August 2021, women's rights in the country have faced severe restrictions, including bans on women's education and limitations on mobility. The article focuses on how these restrictions exacerbate gender inequality and create additional challenges for women, especially those from ethnic minority groups such as the Hazara. On the other hand, global media often

portrays Afghan women as victims, despite notable efforts of protest and resilience by the women themselves. Using Kimberlé Crenshaw's intersectionality theory, this article explores how Afghan women's experiences are shaped by various intersecting factors of oppression, such as gender, ethnicity, and socio-economic status. Furthermore, Fairclough's critical discourse analysis is applied to understand how global media constructs narratives about Afghan women and how these narratives contribute to the international discourse on women's rights in Afghanistan. The findings of this study highlight the importance of global solidarity, the role of social media, and the involvement of the Afghan diaspora in raising issues about women in Afghanistan, although significant challenges to achieving concrete change remain.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji bagaimana media global memainkan peran dalam perjuangan perempuan Afghanistan untuk kesetaraan gender, menggunakan pendekatan interseksionalitas dan analisis wacana kritis Fairclough. Sejak pengambil alihan Afghanistan oleh Taliban pada Agustus 2021, hak-hak perempuan di negara tersebut mengalami pembatasan yang drastis, termasuk larangan pendidikan bagi perempuan dan pembatasan mobilitas. Artikel ini berfokus

pada bagaimana pembatasan ini memperburuk ketimpangan gender dan menciptakan tantangan tambahan bagi perempuan, terutama yang berasal dari kelompok etnis minoritas seperti Hazara. Di sisi lain, media global sering kali menggambarkan perempuan Afghanistan sebagai korban, meskipun ada juga upaya protes dan ketahanan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Dengan menggunakan teori interseksionalitas Kimberlé Crenshaw, artikel ini mengeksplorasi bagaimana pengalaman perempuan Afghanistan dibentuk oleh berbagai faktor penindasan yang saling berinteraksi, seperti gender, etnisitas, dan status sosial-ekonomi. Selain itu, analisis wacana kritis

Fairclough digunakan untuk memahami bagaimana media global membangun narasi mengenai perempuan Afghanistan dan bagaimana narasi ini berkontribusi pada pembentukan wacana internasional mengenai hak-hak perempuan di Afghanistan. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya solidaritas global, peran media sosial, dan keterlibatan diaspora Afghanistan dalam mengangkat isu-isu perempuan di Afghanistan, meskipun tantangan untuk mencapai perubahan yang konkret tetap besar.

PENDAHULUAN

Sejak pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban pada Agustus 2021, hak-hak perempuan di negara tersebut mengalami pembatasan yang drastis dan sistematis. Keputusan Taliban melarang anak perempuan melanjutkan pendidikan di atas kelas enam adalah salah satu bentuk diskriminasi yang paling mencolok, yang telah memengaruhi sekitar 1,1 juta anak perempuan di Afghanistan (UNICEF, 2022). Langkah ini tidak hanya menciptakan jurang pendidikan yang lebar tetapi juga memperburuk ketimpangan gender yang telah menjadi masalah kronis di negara tersebut. Pendidikan merupakan salah satu alat utama untuk pemberdayaan perempuan, dan kehilangan akses terhadapnya menempatkan perempuan Afghanistan pada posisi yang semakin rentan terhadap kemiskinan, kekerasan berbasis gender, dan ketergantungan ekonomi (Human Rights Watch, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan perempuan Afghanistan selama dua dekade terakhir sebelum kembalinya Taliban telah memberikan dampak signifikan pada penguatan peran perempuan di ruang publik. Sebuah laporan oleh (World Bank, 2018) mencatat bahwa pada tahun 2017, hampir 40% perempuan Afghanistan memiliki akses ke pendidikan dasar, meskipun masih tertinggal jauh dibandingkan laki-laki. Peningkatan ini turut berkontribusi pada keterlibatan perempuan dalam sektor pekerjaan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, yang merupakan pilar penting dalam pembangunan sosial negara. Namun, semua kemajuan ini kini berada di ambang kehancuran akibat kebijakan regresif Taliban.

Pembatasan mobilitas perempuan juga menjadi salah satu kebijakan yang berdampak luas. Menurut laporan (Amnesty International, 2023), aturan yang mewajibkan perempuan bepergian lebih dari 48 kilometer hanya jika didampingi oleh mahram (pendamping laki-laki) telah mempersulit perempuan untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Kebijakan ini juga memperburuk kondisi bagi perempuan di daerah pedesaan, yang sudah sebelumnya terisolasi akibat minimnya infrastruktur. Penelitian oleh (UN Women, 2023) mengungkapkan bahwa pembatasan mobilitas ini meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, karena perempuan sering kali dipaksa untuk bergantung pada anggota keluarga laki-laki yang mungkin menjadi pelaku kekerasan.

Dari sudut pandang global, media internasional telah memainkan peran penting dalam mengangkat isu (Ananda, 2023) hak-hak perempuan Afghanistan ke panggung dunia. Studi yang dilakukan oleh (Altheide, 2022) tentang "*Global Media Representations of Afghan Women*" menunjukkan bahwa liputan media global sering kali menggambarkan perempuan Afghanistan sebagai korban tanpa agen. Narasi semacam ini, meskipun mampu menarik simpati internasional, juga menghilangkan elemen penting dari perjuangan dan ketahanan perempuan Afghanistan. Misalnya, laporan oleh (BBC, 2023) menyoroti aksi-aksi protes yang dilakukan oleh aktivis perempuan di Kabul dan kota lainnya, meskipun mereka menghadapi ancaman kekerasan dan penangkapan oleh Taliban.

Pendekatan berbasis interseksionalitas menjadi relevan dalam memahami kondisi perempuan Afghanistan saat ini. (Crenshaw, 1989) dalam teorinya tentang interseksionalitas menggarisbawahi bahwa bentuk-bentuk penindasan yang berbeda — seperti gender, etnis, dan status sosial-ekonomi — saling berinteraksi dan menciptakan pengalaman unik bagi individu yang berada di persimpangan identitas-identitas tersebut. Dalam konteks Afghanistan, perempuan dari komunitas Hazara, misalnya, menghadapi diskriminasi berlapis karena mereka tidak hanya tertindas berdasarkan gender tetapi juga berdasarkan etnisitas mereka (Minority Rights Group., 2022). Studi oleh (Oxfam, 2022) menunjukkan bahwa perempuan Hazara memiliki akses yang lebih terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan dibandingkan kelompok etnis lainnya di Afghanistan.

Institusi-institusi internasional juga berperan dalam mendorong diskursus global tentang hak-hak perempuan Afghanistan. UN Women, misalnya, meluncurkan program "*Empowering Afghan Women Through Education and Skills*" pada tahun 2022 untuk mendukung inisiatif

pendidikan informal di wilayah yang terdampak. Program ini bertujuan memberikan pelatihan keterampilan dan sumber daya kepada perempuan yang kehilangan akses ke pendidikan formal. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keberlanjutan program tersebut di tengah menurunnya perhatian global terhadap isu Afghanistan. Sebuah laporan dari Human Rights Watch (2023) memperingatkan bahwa bantuan internasional sering kali tidak mencapai komunitas lokal karena hambatan birokrasi dan pengawasan ketat oleh Taliban.

Selain itu, penting untuk mencatat peran diaspora Afghanistan dalam membangun solidaritas internasional. Aktivis perempuan Afghanistan yang tinggal di luar negeri menggunakan media sosial dan platform internasional untuk menyuarakan situasi di tanah air mereka. Kampanye seperti *#StandWithAfghanWomen* menjadi alat penting dalam menarik perhatian komunitas internasional terhadap pelanggaran hak-hak perempuan yang sedang berlangsung. Sebuah artikel oleh The Guardian (2023) menyebut bahwa solidaritas digital ini membantu memperluas jangkauan isu tersebut, meskipun efektivitasnya dalam menciptakan perubahan konkret masih menjadi perdebatan.

Latar belakang ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami dan menangani tantangan yang dihadapi perempuan Afghanistan. Dengan menggabungkan teori interseksionalitas dan analisis komunikasi global, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana media dapat menjadi alat untuk memperjuangkan kesetaraan gender, sekaligus menggali tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa suara perempuan Afghanistan benar-benar terdengar di panggung dunia.

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Teori Interseksionalitas

Teori interseksionalitas adalah sebuah kerangka analisis yang dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw pada akhir 1980-an. Crenshaw, seorang profesor hukum di Universitas Columbia dan Universitas California, Los Angeles (UCLA), menciptakan teori ini untuk menggambarkan bagaimana identitas sosial yang berbeda saling berinteraksi dan menciptakan pengalaman diskriminasi atau ketidaksetaraan yang lebih kompleks dan berlapis. Teori ini menekankan bahwa kategori identitas seperti gender, ras, kelas sosial, agama, dan orientasi seksual tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi selalu saling tumpang tindih, memengaruhi pengalaman individu atau kelompok dalam masyarakat.

Crenshaw pertama kali memperkenalkan teori interseksionalitas untuk menjelaskan ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan kulit hitam di Amerika Serikat, yang sering kali tidak sepenuhnya terwakili dalam analisis diskriminasi gender atau rasial yang terpisah. Misalnya, pengalaman diskriminasi yang dialami oleh perempuan kulit hitam tidak hanya dapat dijelaskan dengan faktor gender atau ras saja, melainkan juga oleh interaksi antara keduanya. Oleh karena itu, interseksionalitas tidak hanya menggali satu dimensi dari identitas atau pengalaman seseorang, tetapi melihat bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dalam membentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi.

Interseksionalitas berakar pada pemahaman bahwa identitas individu adalah hasil dari berbagai kategori sosial yang tidak terpisahkan. Misalnya, seorang perempuan mungkin mengalami penindasan atau ketidaksetaraan yang berbeda dibandingkan dengan seorang laki-laki karena perbedaan gender, namun pengalaman diskriminasi perempuan tersebut bisa sangat berbeda lagi jika dia berasal dari ras atau kelas sosial tertentu. Dengan demikian, teori ini menyoroti bahwa tidak ada pengalaman diskriminasi yang dapat dipahami hanya dengan melihat satu aspek identitas saja.

Crenshaw dalam karya-karyanya, seperti "*Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*" (1989), mengemukakan bahwa teori hukum dan kebijakan sosial di Amerika Serikat (dan di banyak negara lainnya) cenderung membagi masalah diskriminasi menjadi kategori yang terpisah, seperti diskriminasi rasial dan diskriminasi gender. Namun, pada kenyataannya, banyak individu yang mengalami diskriminasi yang melibatkan lebih dari satu kategori identitas. Sebagai contoh, perempuan kulit hitam di AS mungkin menghadapi diskriminasi ganda, baik sebagai perempuan maupun sebagai orang kulit hitam, yang keduanya menciptakan pengalaman yang berbeda dari perempuan kulit putih atau pria kulit hitam.

Teori interseksionalitas tidak hanya terbatas pada konteks sosial-politik di negara-negara Barat, tetapi juga diterapkan secara global untuk memahami pengalaman diskriminasi di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang, perempuan sering kali terjebak dalam interaksi antara seksisme, kemiskinan, rasialisme, dan diskriminasi agama. Dalam kasus perempuan Afghanistan, pengalaman penindasan mereka dapat dijelaskan dengan menggunakan teori ini, karena perempuan di sana tidak hanya mengalami ketidaksetaraan gender akibat kebijakan Taliban, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor etnis, sosial, dan ekonomi yang turut membentuk cara mereka diperlakukan dalam masyarakat.

2. Analisis Wacana Kritis

Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) adalah pendekatan analitis yang bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk dan mencerminkan kekuasaan, ideologi, dan hubungan sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis teks dan wacana yang muncul dalam konteks sosial, politik, dan budaya. CDA sering digunakan untuk mengungkap bias, ketidakadilan sosial, atau ketimpangan kekuasaan yang terkandung dalam bahasa dan representasi media (Fairclough, 1995). Fairclough adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan CDA. Pendekatannya berfokus pada hubungan antara bahasa dan kekuasaan dalam konteks sosial. Menurutnya, wacana bukan hanya mencerminkan realitas tetapi juga membentuknya melalui praktik sosial dan ideologis.

Fairclough memperkenalkan model tiga dimensi CDA (Fairclough, 2003):

A. Dimensi Teks (*Text*)

Analisis Linguistik: Fokus pada elemen-elemen linguistik dalam teks, seperti kosakata, sintaksis, metafora, dan retorika. Analisis ini mencakup studi terhadap pilihan kata, struktur kalimat, penggunaan metafora, dan strategi retorik yang digunakan dalam teks media.

Struktur Teks: Memahami bagaimana teks disusun secara struktural untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu.

B. Dimensi Praktik Diskursif (*Discourse Practice*)

Produksi Teks: Bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Ini mencakup peran aktor-aktor komunikasi seperti jurnalis, editor, dan konsumen media.

Persepsi dan Interpretasi: Bagaimana audiens menerima dan menginterpretasikan teks, serta bagaimana interpretasi ini dipengaruhi oleh konteks sosial dan ideologis mereka.

C. Dimensi Praktik Sosial (*Social Practice*)

Konteks Sosial dan Ideologis: Mengkaji bagaimana teks berhubungan dengan struktur sosial yang lebih luas, termasuk norma, nilai, dan ideologi yang mendasari masyarakat.

Hubungan Kekuasaan: Memahami bagaimana kekuasaan dan ideologi tercermin dan diperkuat melalui wacana.

Norman Fairclough mengembangkan CDA sebagai suatu pendekatan yang mengintegrasikan analisis linguistik dengan teori sosial untuk mengeksplorasi bagaimana wacana mencerminkan dan membentuk struktur kekuasaan serta ideologi dalam masyarakat. Fairclough menekankan bahwa bahasa bukanlah alat netral, melainkan merupakan praktik sosial yang terjalin dengan struktur sosial dan ideologis yang lebih luas (Fairclough, 2013).

3. Konsep Feminisme Interseksional

Feminisme Interseksional adalah pendekatan dalam teori feminisme yang mengakui bahwa pengalaman penindasan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan tidak hanya terbatas pada satu aspek identitas, seperti jenis kelamin atau gender, tetapi juga terjalin dengan faktor-faktor lain seperti ras, kelas sosial, etnis, orientasi seksual, disabilitas, dan faktor-faktor lainnya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw pada tahun 1989 untuk menjelaskan bagaimana diskriminasi yang dihadapi perempuan kulit hitam di Amerika Serikat tidak dapat dipahami hanya sebagai diskriminasi berbasis gender atau ras secara terpisah, tetapi sebagai pengalaman yang saling terkait dan saling mempengaruhi (Crenshaw, 1989).

Feminisme interseksional berangkat dari kesadaran bahwa identitas individu tidak terpisah menjadi kategori tunggal. Sebaliknya, identitas seseorang adalah gabungan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dan membentuk pengalaman hidup mereka. Misalnya, perempuan yang berasal dari kelompok etnis minoritas mungkin menghadapi diskriminasi ganda — berdasarkan gender dan ras — yang membedakan pengalaman mereka dari perempuan dari kelompok dominan. Demikian pula, perempuan yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah dapat mengalami ketidaksetaraan yang lebih dalam karena interaksi antara gender dan kelas sosial.

Crenshaw menjelaskan bahwa sistem-sistem penindasan seperti rasialisme, seksisme, dan kapitalisme tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling bertumpang tindih. Dalam hal ini,

perempuan yang berada pada posisi ganda, seperti perempuan kulit hitam, perempuan pribumi, atau perempuan miskin, akan merasakan bentuk penindasan yang berbeda dari perempuan kulit putih atau perempuan kelas menengah. Penindasan ini sering kali tidak terlihat dalam analisis feminisme tradisional yang memfokuskan pada gender sebagai kategori utama (Crenshaw, 1989).

Salah satu kontribusi penting dari feminisme interseksional adalah bagaimana ia mengarahkan perhatian pada representasi yang lebih inklusif dan beragam dari perempuan dalam media. Representasi media sering kali tidak mencakup pengalaman yang beragam, terutama dari perempuan yang berasal dari ras atau kelas sosial yang berbeda. Misalnya, feminisme interseksional dapat digunakan untuk mengkritisi bagaimana media mengabaikan atau melawan narasi yang lebih inklusif tentang perempuan yang terpinggirkan.

Feminisme interseksional juga muncul sebagai kritik terhadap pendekatan feminisme tradisional yang sering kali terlalu berfokus pada pengalaman perempuan kulit putih, kelas menengah, atau bahkan kelas atas. Feminisme tradisional sering kali mengabaikan atau tidak memperhitungkan bagaimana faktor-faktor lain seperti ras, etnis, atau kelas sosial dapat memperburuk penindasan terhadap perempuan dari kelompok minoritas. Dengan menggunakan kerangka interseksional, feminisme dapat menjadi lebih inklusif dan relevan untuk berbagai kelompok perempuan di seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis representasi perempuan Afghanistan dalam media global. Fokusnya adalah memahami bagaimana media internasional menyampaikan isu-isu terkait kesetaraan gender dan hak asasi manusia di Afghanistan, serta bagaimana narasi tersebut memengaruhi diskursus global. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komunikasi berbasis interseksionalitas. Interseksionalitas sebagai kerangka teori akan digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor seperti gender, kelas sosial, etnisitas, dan agama saling berinteraksi dalam membentuk pengalaman perempuan Afghanistan dalam perjuangan mereka untuk kesetaraan gender. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik mengenai kompleksitas pengalaman perempuan yang sering kali terpinggirkan atau terabaikan dalam narasi global.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari media global yang meliput isu-isu perempuan di Afghanistan. Sumber-sumber media yang akan dianalisis termasuk:

- Artikel berita dari media internasional yang kredibel, seperti BBC, Al Jazeera, The New York Times, dan The Guardian.
- Reportase dan dokumenter yang difokuskan pada situasi perempuan di Afghanistan.
- Laporan organisasi internasional seperti PBB, Human Rights Watch, dan Amnesty International yang mengadvokasi hak-hak perempuan di negara tersebut.

Pada teknik pengumpulan data, dilakukan dengan analisis konten dan Studi kasus. Peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap artikel berita dan liputan media yang menyoroti perjuangan perempuan Afghanistan untuk kesetaraan gender. Proses ini melibatkan pengidentifikasian tema-tema utama, representasi gender, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan tersebut.

Peneliti akan memilih beberapa kasus spesifik dari pemberitaan mengenai perempuan Afghanistan, baik dalam konteks pengakuan hak-hak dasar, pendidikan, pekerjaan, maupun kebijakan yang membatasi kebebasan perempuan. Kasus-kasus ini akan dianalisis dengan memperhatikan bagaimana interaksi antara berbagai kategori identitas (gender, etnis, kelas sosial) ditampilkan dalam media.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik dan analisis diskursus. Analisis tematik bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam pemberitaan media tentang perempuan Afghanistan. Sedangkan, analisis diskursus akan digunakan untuk mengkaji bagaimana media membentuk dan mendiskusikan identitas perempuan di Afghanistan, serta bagaimana isu-isu gender dikaitkan dengan faktor-faktor sosial, budaya, dan politik lainnya. Kerangka teori interseksionalitas akan menjadi alat utama untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor identitas yang saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman perempuan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber data, seperti laporan media, wawancara, dan dokumen dari organisasi internasional. Selain itu, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan refleksif untuk memastikan bahwa peneliti mempertimbangkan bias yang mungkin memengaruhi interpretasi data.

Penelitian ini menerapkan teori interseksionalitas Kimberlé Crenshaw untuk mengidentifikasi tumpang tindih antara gender, etnis, status sosial-ekonomi, dan faktor lainnya yang memengaruhi pengalaman perempuan Afghanistan. Data dianalisis untuk menunjukkan kerentanan unik yang dihadapi kelompok tertentu. Penelitian ini terbatas pada media berbahasa Inggris dan laporan internasional, sehingga mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan perspektif lokal Afghanistan. Selain itu, pendekatan kualitatif ini lebih fokus pada eksplorasi narasi daripada kuantifikasi dampak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi perempuan di Afghanistan berada dalam situasi yang sangat kritis sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021. Peraturan-peraturan yang diterapkan oleh rezim ini, seperti larangan perempuan bersekolah, bekerja, bepergian tanpa pendamping pria, hingga aturan berpakaian yang ketat, telah membatasi ruang gerak perempuan secara sistematis. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut kebijakan ini sebagai bentuk "gender apartheid," yang mengacu pada diskriminasi terorganisir berdasarkan jenis kelamin dan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun, di tengah upaya untuk membangkitkan solidaritas internasional terhadap isu ini, narasi global tentang perempuan Afghanistan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas realitas mereka. Sebagai contoh, media internasional dan organisasi advokasi sering menggambarkan perempuan Afghanistan sebagai korban pasif dari rezim patriarkal, tanpa memperlihatkan upaya resistensi dan keberanian mereka. Representasi semacam ini dapat berkontribusi pada pembentukan stereotip orientalis, yang tidak hanya menyederhanakan isu tetapi juga mengabaikan aspek interseksionalitas yang membentuk pengalaman perempuan Afghanistan.

Interseksionalitas, seperti yang didefinisikan oleh Crenshaw (1989), adalah konsep penting untuk memahami bagaimana berbagai identitas seperti gender, etnis, agama, dan kelas saling berpotongan dan memengaruhi pengalaman diskriminasi. Dalam konteks Afghanistan, perempuan menghadapi tekanan berlapis yang tidak hanya berasal dari kebijakan Taliban, tetapi juga dari struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana narasi global dan komunikasi internasional dapat merepresentasikan kompleksitas ini secara lebih akurat.

Pada saat yang sama, komunikasi memegang peran strategis dalam membangun dukungan internasional untuk hak perempuan Afghanistan. Kampanye dari organisasi seperti UN Women telah memainkan peran penting dalam memobilisasi opini publik global, tetapi strategi komunikasi mereka juga perlu dievaluasi agar lebih sensitif terhadap konteks lokal dan interseksionalitas. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana wacana global tentang hak perempuan Afghanistan dibentuk, serta dampaknya terhadap solidaritas internasional dan kebijakan global. Dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas dan analisis wacana kritis, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana narasi internasional dapat menciptakan atau memperkuat bias, sekaligus mencari cara untuk mempromosikan representasi yang lebih inklusif dan transformatif.

a. Media Global dan Representasi Perempuan Afghanistan

Media global memiliki pengaruh signifikan dalam menciptakan narasi mengenai hak perempuan Afghanistan, terutama sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021. Liputan media sering menggambarkan situasi ini sebagai krisis kemanusiaan, dengan penekanan pada represi yang dialami perempuan di sana. Misalnya, platform seperti *The New York Times*, *BBC*, dan *Al Jazeera* kerap memuat cerita personal yang menyentuh hati untuk menarik perhatian publik global dan memobilisasi dukungan internasional (Siddiqi, 2022). Namun, pendekatan yang dilakukan media ini kerap dikritik karena cenderung menggunakan perspektif feminisme Barat. Liputan ini, menurut beberapa analis, memperkuat citra perempuan Afghanistan sebagai individu tanpa daya, alih-alih menyoroti kemampuan mereka untuk bertahan dan beradaptasi. Misalnya, penelitian menemukan bahwa representasi perempuan Afghanistan lebih sering berfokus pada ketidakadilan yang mereka alami daripada potensi dan perjuangan aktif mereka (Ahmadi, 2021).

Tabel 1. Berita “Women in Afghanistan” dari Media Internasional

Media	Judul Berita
BBC	<ul style="list-style-type: none">• Taliban ban Afghan women from working for NGOs• Taliban ban Afghanistan women from raising voices• Women's rights in Afghanistan
The Guardian	<ul style="list-style-type: none">• How the Taliban are erasing Afghanistan's women• Afghan women on past gains and future hopes• Afghan women stage protest in Kabul after Taliban crack down on women's rights

Al Jazeera	<ul style="list-style-type: none">● Afghanistan's Taliban rulers say will close all NGOs employing women● What's Troubling Her? Treating women's mental health in Afghanistan● What do the Taliban's new rules mean for Afghans?
CNN	<ul style="list-style-type: none">● The Taliban say they will close all NGOs employing Afghan women● Shut out of school by the Taliban, Afghan girls and women are finding new ways to learn● Taliban bans the sound of women's voices singing or reading in public

Media global sering kali menggambarkan perempuan Afghanistan sebagai korban sistemik akibat kebijakan Taliban. Penekanan ini mengabaikan cerita perjuangan yang dialami perempuan Afghanistan. Studi Siddiqi (2022) menunjukkan bahwa mayoritas pemberitaan media setelah tahun 2021 terpusat pada isu pelarangan pendidikan, pembatasan pekerjaan, dan kekerasan berbasis gender. Hanya sebagian kecil yang memberikan ruang untuk memperlihatkan keberanian mereka dalam menghadapi penindasan, seperti melalui aktivisme lokal atau pelatihan keterampilan. Narasi yang didominasi oleh penderitaan dapat menanamkan persepsi global bahwa perempuan Afghanistan sepenuhnya bergantung pada bantuan eksternal, meskipun kenyataannya mereka memiliki peran signifikan sebagai agen perubahan di komunitasnya.

Liputan media global juga mencerminkan ideologi Barat, di mana nilai-nilai feminisme universal dijadikan tolok ukur untuk menilai situasi di Afghanistan. Hal ini menimbulkan hegemoni narasi Barat yang kurang mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal (Abu-Lughod, 2002). Program pendidikan atau pemberdayaan perempuan yang diinisiasi oleh donor internasional sering kali tidak selaras dengan kebutuhan komunitas lokal, meskipun diliput sebagai solusi ideal oleh media. Representasi perempuan Afghanistan dalam media internasional telah berhasil menarik perhatian global, menghasilkan peningkatan tekanan pada negara-negara donor untuk bertindak. Misalnya, liputan intensif menggerakkan organisasi seperti UN Women untuk mempercepat advokasi hak-hak perempuan Afghanistan (UN Women, 2022). Namun, narasi ini juga digunakan oleh beberapa negara untuk memajukan agenda geopolitik, seperti yang terlihat dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Noor, 2021).

Salah satu contoh representasi perempuan Afghanistan dalam media internasional adalah liputan *The Guardian* tentang Zahra Joya, seorang jurnalis perempuan Afghanistan yang mendirikan *Rukhshana Media*, platform berita yang berfokus pada suara perempuan di

Afghanistan (The Guardian, 2022). Artikel tersebut menyoroti upayanya untuk melaporkan realitas yang dihadapi perempuan, seperti pernikahan paksa dan kekerasan domestik, meskipun dirinya harus bersembunyi dan bekerja dari luar negeri. Representasi ini menggambarkan perempuan Afghanistan tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai penggerak perubahan meski dalam kondisi sulit.

“Although it has never been easy to be a woman and a journalist in Afghanistan, now our reporting has been almost eradicated,” – Zahra Joya

Media global memiliki peran yang signifikan dalam menyajikan narasi tentang perempuan Afghanistan, terutama di tengah represi yang diperparah setelah kembalinya Taliban. Dalam konteks ini, liputan media sering kali mengangkat cerita tentang bagaimana hak-hak perempuan di Afghanistan dibungkam oleh kebijakan represif. Salah satu representasi yang menonjol adalah pemberitaan tentang Zahra Joya, pendiri *Rukhshana Media*, sebuah platform yang dirancang untuk memberikan suara bagi perempuan Afghanistan. Melalui pemberitaan tentang kekerasan domestik, pernikahan paksa, dan pelanggaran hak-hak perempuan lainnya, *Rukhshana Media* menggambarkan bagaimana perempuan berjuang untuk bertahan meski hak-hak dasar mereka dihilangkan (The Guardian, 2022).

Pemberitaan seperti ini memberikan wawasan kepada masyarakat global mengenai bagaimana perempuan Afghanistan tidak hanya menghadapi represi gender, tetapi juga mengalami penghapusan dari ruang publik dan wacana sosial. Dalam situasi seperti ini, media internasional bertindak sebagai alat yang membawa perhatian dunia terhadap ketidakadilan tersebut. Namun, narasi yang dibangun sering kali berfokus pada penderitaan perempuan sebagai korban, tanpa memberikan ruang yang cukup untuk menyoroti upaya resistensi dan ketangguhan mereka. Hal ini menciptakan gambaran yang kurang seimbang dan terkadang memperkuat stereotip yang ada.

Pendekatan berbasis interseksionalitas memberikan lensa yang berguna untuk menganalisis bagaimana berbagai bentuk penindasan saling berkelindan dalam situasi ini. Media global dapat membantu menyoroti dimensi lain dari pengalaman perempuan Afghanistan, termasuk bagaimana faktor-faktor seperti etnisitas, kelas sosial, dan lokasi geografis turut memperparah represi yang mereka alami (Siddiqi, 2022). Pendekatan ini tidak hanya mengungkapkan kompleksitas masalah, tetapi juga membantu merancang strategi yang

lebih efektif untuk mendukung perempuan Afghanistan. Dengan narasi yang menyuarakan hak-hak yang dibungkam, media internasional memiliki peluang untuk memengaruhi kebijakan global, terutama terkait bantuan internasional dan diplomasi. Liputan yang mendalam dan berbasis fakta dapat memperkuat urgensi untuk bertindak, baik melalui tekanan diplomatik terhadap rezim Taliban maupun melalui program bantuan yang dirancang untuk mendukung perempuan di Afghanistan.

b. Interseksionalitas dalam Konteks Perempuan Afghanistan

Interseksionalitas, sebagai suatu kerangka teoritis dan analitis, mengakui bahwa identitas individu terbentuk dari berbagai dimensi sosial yang saling bertautan, termasuk ras, kelas, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengalaman hidup seseorang. Dalam konteks perempuan Afghanistan, interseksionalitas dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana berbagai bentuk penindasan—berdasarkan gender, agama, etnisitas, kelas sosial, dan kebijakan negara—berinteraksi untuk membentuk pengalaman hidup perempuan di Afghanistan, khususnya terkait pendidikan, kebebasan beraktivitas, dan peran sosial.

Afghanistan, di bawah pemerintahan Taliban, telah mengalami perubahan besar sejak pengambilalihan kembali negara tersebut pada Agustus 2021. Taliban, yang sebelumnya berkuasa pada tahun 1996 hingga 2001, kembali mengambil kendali setelah penarikan pasukan AS. Sejak itu, mereka menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat membatasi hak-hak perempuan, termasuk melarang perempuan untuk bersekolah, bekerja, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial. Kembali berkuasanya Taliban tidak hanya menandai kembalinya rezim yang dikenal dengan penerapan hukum yang sangat konservatif, tetapi juga memunculkan tantangan besar bagi perempuan Afghanistan yang sudah lama berjuang untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan dasar.

Sejak pengambilalihan Taliban, perempuan Afghanistan telah menghadapi berbagai bentuk penindasan yang tidak hanya berasal dari sistem patriarkal yang mendalam, tetapi juga diperburuk oleh kebijakan negara yang mendiskriminasi perempuan secara sistematis. Pendidikan, yang sebelumnya telah menjadi alat pemberdayaan bagi banyak perempuan Afghanistan, kini menjadi salah satu bidang yang sangat dibatasi oleh kebijakan Taliban. Dengan penutupan sekolah menengah dan universitas untuk perempuan, akses perempuan terhadap pendidikan telah dipangkas secara drastis.

Dalam hal ini, interseksionalitas mengungkapkan kompleksitas penindasan yang dihadapi oleh perempuan Afghanistan, yang tidak hanya terperangkap dalam ketidaksetaraan gender, tetapi juga dalam berbagai lapisan ketidakadilan lainnya.

1). Penindasan Berdasarkan Gender dan Pendidikan

Perempuan Afghanistan yang berusaha mengakses pendidikan menghadapi hambatan terbesar yang ditetapkan oleh Taliban. Sejak mereka kembali berkuasa, Taliban telah mengeluarkan perintah untuk menutup sekolah menengah perempuan dan universitas. Keputusan ini menghilangkan harapan bagi banyak perempuan muda yang sebelumnya sempat merasakan akses pendidikan. Sebelum pengambilalihan Taliban, perempuan di Afghanistan mengalami kemajuan signifikan dalam bidang pendidikan, terutama pada era pasca 2001, ketika partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi meningkat pesat. Namun, pada tahun 2021, segalanya berubah, dan perempuan kembali terjebak dalam ketidakberdayaan yang diatur oleh kebijakan negara.

Dalam konteks interseksionalitas, larangan ini sangat merugikan perempuan dari latar belakang miskin atau pedesaan. Mereka yang berasal dari keluarga dengan sumber daya terbatas sering kali telah berjuang keras untuk dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi, hanya untuk melihat harapan mereka dihancurkan ketika kebijakan Taliban diberlakukan. Seorang mahasiswa yang diwawancarai dalam berita yang dilaporkan oleh BBC mengungkapkan bagaimana dirinya merasa dihancurkan ketika pendidikan yang selama ini menjadi jembatan untuk memperbaiki kehidupan masa depannya kini dilarang oleh pemerintah Taliban (BBC, 2024). Pengalaman semacam ini tidak hanya mencerminkan penindasan berdasarkan gender tetapi juga memperlihatkan bagaimana ketidaksetaraan ekonomi, geografis, dan sosial memperburuk pengalaman perempuan yang ingin mengakses pendidikan.

2). Penindasan Berdasarkan Agama dan Interpretasi Hukum

Afghanistan adalah negara yang sangat religius, dan mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni. Taliban, yang juga mengklaim dirinya sebagai pembela hukum Syariah, menggunakan interpretasi mereka tentang hukum Islam untuk membenarkan kebijakan yang

menindas perempuan. Dalam hal ini, interseksionalitas dapat membantu kita melihat bagaimana pengaruh agama—dalam hal ini interpretasi agama yang konservatif—berinteraksi dengan ketidaksetaraan gender yang sudah ada. Seorang mahasiswa yang diwawancarai dalam berita CNN mengungkapkan bahwa dia percaya tindakan Taliban bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Dia menyatakan bahwa perintah Taliban untuk melarang perempuan bersekolah bertentangan dengan hak-hak yang diberikan oleh Allah dalam agama Islam (CNN, 2024). Ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara para perempuan Afghanistan dan Taliban terkait interpretasi agama, yang juga menjadi bagian dari konflik yang lebih besar dalam masyarakat Afghanistan. Dalam perspektif interseksionalitas, ketidaksetaraan gender yang diberlakukan oleh Taliban semakin diperburuk dengan klaim otoritas agama mereka, yang menjadi dasar untuk melegitimasi diskriminasi terhadap perempuan.

3). Dampak Ekonomi dan Sosial pada Perempuan Afghanistan

Tidak hanya pendidikan, perempuan Afghanistan juga terjebak dalam pembatasan sosial dan ekonomi yang parah. Kebijakan Taliban tidak hanya membatasi akses perempuan ke ruang publik, tetapi juga membatasi kesempatan kerja mereka. Banyak perempuan di Afghanistan kini tidak dapat bekerja di berbagai sektor dan dipaksa untuk mengandalkan wali laki-laki untuk bepergian jauh atau untuk mendapatkan izin untuk bekerja. Ini menunjukkan lapisan lain dari penindasan yang dihadapi perempuan, di mana ketidaksetaraan ekonomi juga menjadi penghalang besar untuk pemberdayaan mereka. Sumber daya ekonomi yang terbatas juga membatasi perempuan dari kalangan miskin atau pedesaan untuk mendapatkan akses ke pendidikan atau pekerjaan yang layak. Terlebih lagi, perempuan yang lebih tua atau yang sudah berkeluarga menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan atau pendidikan karena kewajiban mereka terhadap keluarga dan norma sosial yang membatasi kebebasan mereka.

Kemudian, dalam menurut Amnesty International, salah satu contoh nyata adalah pengalaman perempuan dari komunitas Hazara, sebuah kelompok minoritas etnis yang secara historis menghadapi diskriminasi. Perempuan Hazara tidak hanya menghadapi pembatasan gender yang diterapkan oleh rezim Taliban tetapi juga bentuk diskriminasi etnis, seperti akses yang terbatas ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Dalam laporan oleh (Amnesty International, 2023), perempuan Hazara di daerah pedesaan dilaporkan lebih

rentan terhadap pernikahan paksa dan kekerasan berbasis gender dibandingkan kelompok lain, mengingat akses mereka yang terbatas ke perlindungan hukum dan bantuan internasional. Selain itu, lokasi geografis menjadi faktor penentu dalam pengalaman perempuan Afghanistan. Di daerah perkotaan seperti Kabul, perempuan memiliki akses yang relatif lebih baik ke pendidikan dan peluang ekonomi, setidaknya sebelum kembalinya Taliban. Sebaliknya, di daerah pedesaan, norma-norma patriarki yang kaku dan kontrol sosial yang ketat memperburuk keadaan perempuan. Misalnya, laporan dari Human Rights Watch (2022) menyebutkan bahwa perempuan di daerah pedesaan sering kali menghadapi ancaman langsung kekerasan jika mencoba untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja tanpa pendamping laki-laki.

Kelas sosial juga memainkan peran penting dalam menambah kerentanan perempuan Afghanistan. Perempuan dari keluarga yang lebih miskin sering kali tidak memiliki sumber daya untuk melarikan diri dari kondisi represif. Mereka juga lebih bergantung pada pekerjaan informal atau manual, yang semakin sulit diakses di bawah kebijakan Taliban. Penelitian oleh (CARE International, 2023) menunjukkan bahwa perempuan miskin menghadapi risiko lebih besar terhadap eksploitasi seksual dan kekerasan, terutama ketika mereka menjadi pencari nafkah tunggal untuk keluarga mereka. Sanksi ekonomi terhadap Taliban sering kali memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan miskin, yang bergantung pada bantuan kemanusiaan atau ekonomi untuk bertahan hidup. Menurut laporan oleh UN Women (2023), perempuan kepala keluarga, terutama yang kehilangan suami akibat konflik, menjadi salah satu kelompok paling terdampak oleh pembatasan akses ke bantuan internasional.

Pembatasan yang diberlakukan pada perempuan oleh pemerintah Afghanistan yang baru sangat keras, setidaknya begitulah adanya. Kemajuan yang dicapai perempuan Afghanistan dalam 20 tahun terakhir sedang dirusak. Dari hak reproduksi hingga pendaftaran sekolah, dari partisipasi dalam pemerintahan hingga akses pasar tenaga kerja. Kebebasan yang telah diraih perempuan, dirampas dari mereka (Cordaid International, 2022). Ambil contoh kehadiran anak perempuan di sekolah, yang meningkat drastis dalam dua dekade terakhir, baik di sekolah dasar maupun menengah dan di universitas. Saat ini, hingga pemberitahuan lebih lanjut, Taliban telah menetapkan bahwa anak perempuan tidak diperbolehkan bersekolah di atas kelas 6 (usia 10 tahun ke atas). Sekolah dasar dan universitas masih dapat diakses tetapi telah sepenuhnya dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Untuk

universitas negeri, ada hari-hari khusus jenis kelamin. Dan banyak anak perempuan tidak lagi masuk kelas karena kurangnya guru perempuan.

Menurut laporan dari (Cordaid International, 2022), kebijakan gender yang baru tidak hanya memengaruhi kehidupan individu tetapi juga membentuk lembaga dan masyarakat. Saat ini tidak ada badan hukum yang dapat dijadikan tempat bagi perempuan untuk mengadu ketika hak-hak mereka dilanggar. Lembaga-lembaga utama untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan, seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Kementerian Urusan Perempuan, dan berbagai organisasi masyarakat sipil, telah dihapuskan baru-baru ini. Selain itu, parlemen, yang menjadi platform representasi paling penting bagi perempuan, juga telah dibubarkan.

Tabel 2. Interseksionalitas Perempuan Afghanistan pada Media Internasional

Media	Judul Berita	Fokus Utama	Dampak	Dimensi Interseksionalitas
BBC	<i>Taliban ban Afghan women from working for NGOs</i>	Larangan perempuan bekerja di NGO	Kehilangan pekerjaan dan penghasilan bagi perempuan yang bekerja di sektor NGO.	Perempuan miskin dan dari wilayah terpencil paling terdampak karena ketergantungan ekonomi yang lebih tinggi.
	<i>Taliban ban Afghanistan women from raising voices</i>	Pelarangan perempuan bersuara di ruang publik	Perempuan kehilangan kesempatan untuk menyampaikan opini atau memimpin perubahan sosial.	Perempuan muda, aktivis, dan minoritas semakin terpinggirkan dalam kehidupan publik.
	<i>Women's rights in Afghanistan</i>	Pembatasan hak-hak perempuan secara umum	Hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak dikikis secara sistematis.	Perempuan minoritas etnis dan sosial mengalami diskriminasi berlapis.
The Guardian	<i>How the Taliban are erasing Afghanistan's women</i>	Penghapusan identitas perempuan dalam publik	Perempuan dikeluarkan dari semua sektor publik, termasuk pendidikan, budaya, dan pekerjaan.	Perempuan kelas bawah dan daerah terpencil kehilangan akses ke ruang publik dan visibilitas nasional.
	<i>Afghan women on past gains and future hopes</i>	Harapan dan kemunduran hak perempuan	Perempuan yang sempat merasakan kebebasan kini menghadapi ketidakpastian masa depan mereka.	Perempuan berpendidikan menghadapi trauma akibat kehilangan kesempatan mereka.
	<i>Afghan women stage protest in</i>	Perlawanan terhadap	Risiko kekerasan fisik, intimidasi, dan	Aktivis perempuan dan kelompok oposisi

	<i>Kabul after Taliban crack down on women's rights</i>	kebijakan diskriminatif	pemerjaraan bagi perempuan yang melakukan aksi protes.	menghadapi ancaman langsung terhadap keselamatan mereka.
AI Jazeera	<i>Afghanistan's Taliban rulers say will close all NGOs employing women</i>	Larangan bekerja di NGO	NGO kehilangan staf terampil, sehingga layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan terganggu.	Perempuan dari keluarga miskin kehilangan pendapatan dan dukungan komunitas.
	<i>What's Troubling Her? Treating women's mental health in Afghanistan</i>	Kesehatan mental perempuan Afghanistan	Perempuan menghadapi tekanan mental akibat kehilangan pekerjaan, pendidikan, dan hak-hak dasar.	Perempuan dengan tanggungan keluarga mengalami tekanan yang lebih berat.
	<i>What do the Taliban's new rules mean for Afghans?</i>	Dampak aturan Taliban pada masyarakat	Perempuan semakin terisolasi secara sosial dan ekonomi akibat peraturan yang mengekang.	Kelompok perempuan minoritas mengalami diskriminasi tambahan.
CNN	<i>The Taliban say they will close all NGOs employing Afghan women</i>	Larangan bekerja di NGO	Perempuan kehilangan pekerjaan, sementara komunitas kehilangan layanan penting dari NGO.	Dampak lebih besar pada perempuan dengan tanggungan keluarga di daerah terpencil.
	<i>Shut out of school by the Taliban, Afghan girls and women are finding new ways to learn</i>	Pembatasan akses pendidikan	Perempuan mencari alternatif pendidikan, seperti belajar secara daring atau mandiri.	Perempuan dari pedesaan sulit mengakses teknologi dan jaringan alternatif.
	<i>Taliban bans the sound of women's voices singing or reading in public</i>	Larangan suara perempuan di ruang publik	Budaya dan seni kehilangan representasi perempuan, menciptakan kekosongan dalam ekspresi budaya.	Perempuan yang aktif dalam seni dan budaya kehilangan ruang mereka sepenuhnya.

Olahan data penulis

c. Peran Organisasi Internasional

Uni Eropa (UE) telah menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan melalui pendekatan yang transformatif, berbasis hak, dan interseksional dalam program pembangunannya (European Union, 2024). Pendekatan ini mencakup promosi keterlibatan di tingkat internasional, regional, dan

nasional dengan fokus pada enam prioritas tematik. Di tingkat nasional, UE mendukung kesetaraan gender melalui program yang melibatkan aktor internasional, PBB, dan LSM lokal. Salah satu contohnya adalah Inisiatif Spotlight UE-PBB, yang bertujuan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, meski program ini berakhir pada 2023. Sejak 2021, UE mengalihkan fokusnya dari bantuan pembangunan ke bantuan kebutuhan dasar dan penghidupan dengan pendekatan berprinsip "untuk perempuan, oleh perempuan." Upaya ini mencakup pemberdayaan perempuan melalui jaringan berbasis komunitas, UMKM, serta bisnis yang dipimpin perempuan, sambil mendukung penghentian kekerasan berbasis gender, pendidikan yang inklusif, serta akses ke layanan kesehatan (European Union, 2024).

Dukungan UE juga menasar peningkatan ketahanan pangan di daerah rentan melalui pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap iklim. Pendekatan ini menekankan inklusi perempuan dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya (European Union, 2024). Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprioritaskan kesetaraan gender dalam *Kerangka Strategis PBB 2023–2025* yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sambil memperkuat inklusi sosial, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Kerangka ini mencakup tiga prioritas utama (United Nations, 2023):

1. Layanan penting yang berkelanjutan,
2. Penghidupan dan peluang ekonomi yang tangguh,
3. Kohesi sosial dan kesetaraan gender.

Melalui strategi ini, PBB mendukung perempuan Afghanistan dalam menghadapi guncangan sosial dan ekonomi, mempertahankan penghidupan, serta melestarikan capaian pembangunan selama dua dekade terakhir, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar. Pada periode 2023–2025, sekitar 21% dari intervensi PBB menargetkan kesetaraan gender sebagai tujuan utama, sementara 73% lainnya menjadikannya sebagai tujuan penting. Berbagai organisasi internasional telah berkontribusi signifikan dalam mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan hak asasi manusia di Afghanistan. Dengan pendekatan yang beragam, program-program ini bertujuan memberikan perlindungan, memberdayakan perempuan, serta memastikan keberlanjutan layanan dasar di tengah tantangan sosial, politik, dan keamanan yang kompleks.

Sebagai pemimpin dalam isu kesetaraan gender di Afghanistan, UN Women telah memperkuat suara perempuan melalui kemitraan dengan LSM lokal yang dipimpin perempuan. UN Women memfasilitasi ruang bagi perempuan Afghanistan untuk menyuarakan kebutuhan mereka, melawan penghapusan sistematis hak-hak perempuan, dan membangun kembali gerakan perempuan yang melemah (UN Women, 2023). Fokus utama UN Women adalah mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dengan memastikan layanan penting yang responsif gender tersedia di seluruh Afghanistan. Ini melibatkan penguatan kapasitas mitra, jalur rujukan, serta pendekatan berbasis masyarakat untuk mencegah dan menanggapi kekerasan berbasis gender. Selain itu, UN Women mendukung aksi kemanusiaan yang responsif gender melalui *Gender in Humanitarian Action (GiHA)* dan memberikan bantuan darurat melalui organisasi perempuan di lapangan. UN Women juga memimpin upaya pengumpulan data dan dokumentasi terkait situasi perempuan di Afghanistan untuk mengadvokasi perhatian internasional. Dengan mendukung pengembangan kapasitas, pemberian hibah fleksibel, dan penguatan institusi perempuan, UN Women berperan penting dalam menjaga harapan akan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tengah tantangan yang semakin kompleks (UN Women, 2023).

Sebagai mekanisme pendanaan global, *The Women's Peace and Humanitarian Fund (WPHF)* mendukung partisipasi, kepemimpinan, dan pemberdayaan perempuan dalam situasi konflik dan kemanusiaan. Di Afghanistan, WPHF memberikan dukungan pada organisasi perempuan untuk mengurangi kekerasan berbasis gender, melindungi keselamatan dan hak asasi perempuan, serta mempertahankan kelangsungan hidup organisasi perempuan lokal di tengah pembatasan operasional (Women's Peace and Humanitarian Fund, 2020). Sejak 2020, pendanaan WPHF telah membantu organisasi perempuan dalam pemulihan sosial ekonomi bagi pengungsi di Pakistan dan Tajikistan, mendukung pembela hak asasi perempuan melalui hibah perlindungan, serta mendorong partisipasi perempuan Afghanistan dalam proses perdamaian.

Selain itu, *United Nations Population Fund (UNFPA)* berfokus pada hak kesehatan seksual dan reproduksi (SHRH) dengan mendukung layanan kesehatan ibu, keluarga berencana, dan pemberian layanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat (United Nations Population Fund, 2023). Selain itu, program UNFPA mencakup dukungan psikososial bagi korban kekerasan berbasis gender (GBV) serta edukasi tentang gaya hidup sehat untuk

remaja, termasuk pencegahan perkawinan anak. Program *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) juga memadukan perlindungan berbasis gender dengan pembangunan komunitas di wilayah yang menjadi prioritas pemulangan pengungsi dan pengungsi internal (IDP). Dukungan ini meliputi bantuan hukum, dukungan psikososial, bantuan tunai, akses ke dokumen identitas, serta penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha kecil dan menengah serta hibah mikro (UNHCR, 2023).

UNICEF mengintegrasikan pendekatan berbasis gender dalam program-programnya, termasuk kesehatan, gizi, dan pendidikan. Program kesehatan UNICEF memastikan keberlanjutan layanan primer dan sekunder dengan fokus pada keberadaan staf perempuan. Di sektor pendidikan, UNICEF mendukung kelas berbasis komunitas, akses pendidikan untuk anak putus sekolah, dan distribusi materi belajar. Selain itu, program gizi UNICEF mencakup pemberian makanan bergizi serta transfer tunai kepada keluarga ibu hamil dan menyusui (UNICEF, 2023).

The World Food Programme (WFP) menjalankan tiga program utama yang memprioritaskan kesetaraan gender: Program pemberian makanan sekolah untuk mendukung kehadiran anak perempuan di sekolah. Program bantuan pangan untuk pelatihan yang menggabungkan pelatihan keterampilan vokasi dengan dukungan pangan dan transfer tunai. Percontohan perlindungan sosial, yang mencakup transfer tunai jangka panjang untuk ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun, digabungkan dengan komunikasi perubahan perilaku sosial (World Food Programme, 2023). Selain itu, terdapat juga *United Nations Development Programme* (UNDP) memfokuskan programnya pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui dukungan pada UMKM, pelatihan teknis, dan pendidikan lintas batas. Selain itu, program ini mengintegrasikan mitigasi risiko kekerasan domestik dan eksploitasi seksual melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan psikososial (UNDP, 2023). Kemudian, *The World Health Organization* (WHO) memimpin upaya integrasi gender di bidang kesehatan melalui Unit Gender, Kesetaraan, dan Hak Asasi Manusia (GER). Unit ini mengembangkan kapasitas penyedia layanan kesehatan untuk menangani kekerasan berbasis gender, mempromosikan advokasi gender di tingkat nasional, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 3 (kesehatan) dan SDG 5 (kesetaraan gender) (World Health Organization, 2023).

Upaya kolektif berbagai organisasi internasional dan lembaga multilateral dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun tantangan sosial, politik, dan keamanan terus menghambat kemajuan, program-program inovatif berbasis gender yang melibatkan masyarakat lokal tetap menjadi kunci keberlanjutan. Dengan pendekatan yang inklusif dan transformatif, dukungan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penguatan kapasitas, dan pembangunan ekonomi. Melalui kerangka kerja yang tangguh, harapan untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender di Afghanistan tetap hidup, sekaligus menjadi pengingat pentingnya solidaritas global dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan pembangunan.

d. Analisis Wacana Kritis terhadap Media Global

Hak perempuan di Afghanistan terus menjadi sorotan dalam diskursus global, terutama setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang menuai kecaman internasional adalah larangan terhadap perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi. Media Barat, seperti The Guardian, BBC dan CNN, telah menjadi aktor utama dalam membingkai isu ini, menyajikan narasi yang mencerminkan respons global terhadap situasi perempuan di Afghanistan. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) ala Fairclough, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana media global membingkai isu ini, dengan fokus pada praktik diskursif, produksi teks, dan hubungan kekuasaan yang tercermin dalam pemberitaan.

Berita (BBC, 2022) berjudul "*Afghanistan: Taliban ban women from universities amid condemnation*" merepresentasikan larangan pendidikan bagi perempuan sebagai tindakan yang menimbulkan keputusasaan dan kecaman internasional. Dalam dimensi tekstual, judul menggunakan kata "*bans*" yang tegas untuk menyoroti sifat otoriter dari kebijakan tersebut, sementara pilihan kata seperti "kecaman," "keputusasaan," dan "isolasi terhadap perempuan" menciptakan narasi emosional yang menggambarkan Taliban sebagai aktor represif. Kutipan langsung dari mahasiswa, seperti pernyataan bahwa larangan ini telah "menghancurkan satu-satunya jembatan yang dapat menghubungkan saya dengan masa depan," memperkuat representasi perempuan sebagai korban utama kebijakan ini. Struktur

teks dimulai dengan pengumuman larangan, diikuti reaksi dari korban, organisasi internasional, dan pemerintah, menciptakan kerangka narasi yang menyeluruh.

Pada dimensi praktik diskursif, berita ini diproduksi oleh BBC, media Barat yang secara ideologis mendukung hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Pilihan narasi menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan Afghanistan, dengan memprioritaskan suara korban dan mengkritik kebijakan Taliban. Sebagai media global, BBC menargetkan pembaca internasional, khususnya di Barat, dengan tujuan memobilisasi opini publik untuk mendukung perempuan Afghanistan dan mengutuk Taliban. Pemberitaan ini juga memanfaatkan berbagai sumber, termasuk mahasiswa, aktivis, dan pejabat internasional, untuk memperkuat kredibilitas laporan.

Dalam dimensi praktik sosial, berita ini mencerminkan konteks sosial dan politik di Afghanistan, di mana kebijakan Taliban mereproduksi pola-pola pembatasan terhadap perempuan yang telah berlangsung sebelumnya. Teks ini menyoroti ketimpangan kekuasaan, dengan Taliban sebagai otoritas dominan yang mendefinisikan ulang norma sosial dan agama, serta perempuan sebagai kelompok yang dimarginalkan. Selain itu, berita ini mendukung ideologi global tentang kesetaraan gender dan pendidikan sebagai hak asasi manusia, dengan tujuan menciptakan tekanan geopolitik terhadap Taliban. Pemberitaan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun wacana yang memperkuat narasi hak-hak perempuan sebagai isu global.

Analisis berita (CNN, 2022) berjudul *"Taliban suspend university education for women in Afghanistan"* menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Fairclough mengungkapkan beberapa dimensi yang saling terkait. Pada level tekstual, berita ini menggunakan bahasa yang kuat dan emosional, dengan frasa seperti *"brutal clampdown"*, *"shameful decision"*, dan *"indefensible"* untuk menggambarkan kebijakan Taliban. Pilihan kata ini menekankan kesan bahwa tindakan Taliban sangat represif dan tidak dapat dibenarkan secara moral. Selain itu, penggunaan istilah *"rights and freedoms"* menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia sebagai tema utama dalam teks ini. Dalam dimensi praktik diskursif, CNN, sebagai media Barat, memproduksi teks ini untuk audiens global dengan mengutip sumber-sumber internasional yang kredibel seperti Human Rights Watch dan pejabat AS, yang mengkritik kebijakan Taliban. Hal ini menciptakan narasi yang menempatkan Taliban sebagai pelanggar norma internasional terkait hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Berita ini juga membangun konteks politik internasional, dengan penekanan pada ketegangan antara Taliban dan komunitas internasional, khususnya AS, yang berusaha menekan Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan. Pada dimensi praktik sosial, berita ini mencerminkan realitas sosial Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, yang melanjutkan tradisi penindasan terhadap perempuan, termasuk larangan pendidikan, bekerja, dan kebebasan bergerak. Penggunaan sejarah perlakuan Taliban terhadap perempuan mempertegas bahwa kebijakan saat ini merupakan bagian dari pola penindasan yang berkelanjutan. Selain itu, berita ini menyoroti bagaimana wacana hak asasi perempuan digunakan sebagai alat diplomasi untuk mengecam kebijakan Taliban dan menuntut perubahan. Secara keseluruhan, berita ini merepresentasikan perempuan Afghanistan sebagai korban dari sistem yang menindas, sementara Taliban digambarkan sebagai aktor yang menanggalkan hak-hak dasar perempuan. Narasi ini juga menegaskan benturan antara nilai-nilai hak asasi manusia global dan ideologi fundamentalis Taliban, di mana ketidakpatuhan Taliban terhadap norma internasional memperburuk isolasi politik mereka di mata dunia.

Kemudian, berita dari (The Guardian, 2022) dengan judul *"Taliban ban Afghan women from university education"*, pada dimensi teks berita ini menggunakan bahasa yang menggambarkan tindakan Taliban sebagai keputusan yang sangat repressif dan merugikan hak asasi manusia, dengan frasa seperti *"indefinite ban"*, *"brutal clampdown"*, dan *"chilling step backwards"*. Pemilihan kata ini bertujuan untuk menciptakan konotasi negatif terhadap Taliban, menekankan keputusannya sebagai regresi signifikan dalam hak pendidikan perempuan di Afghanistan. Selain itu, kutipan dari Meena, seorang dosen, yang mengatakan *"One of them moved to Kabul from a remote province, overcoming so many hardships, because she got into a prestigious university here. All her hopes and dreams were crushed today"*, memberikan dampak emosional yang mempertegas kesan bahwa kebijakan ini menghancurkan kehidupan dan harapan banyak perempuan. Teks juga menggunakan kata-kata yang mengarahkan pembaca pada kesan ketidakberdayaan perempuan Afghanistan, seperti *"they are scared and terrified, looking at a hopeless future"*, yang memberi penekanan pada perasaan terisolasi dan putus asa yang dirasakan oleh banyak perempuan di Afghanistan akibat kebijakan ini.

Pada dimensi praktik diskursif, Berita ini memproduksi wacana yang didorong oleh sumber-sumber internasional yang kredibel seperti Human Rights Watch, UN, dan pejabat AS.

Dengan mencantumkan pernyataan-pernyataan kritis dari aktor internasional tersebut, *The Guardian* menciptakan narasi yang menempatkan Taliban sebagai pelanggar hak asasi manusia yang sistematis, khususnya terhadap hak pendidikan perempuan. Media ini juga menyertakan perspektif dari beberapa tokoh lokal Afghanistan, seperti Meena, untuk menggambarkan dampak langsung dari kebijakan tersebut pada individu-individu di tingkat lapangan. Penyertaan perspektif ini memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan Taliban mempengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan di Afghanistan. Selain itu, penggunaan laporan yang menyebutkan bahwa Taliban "*adhering to an austere version of Islam*" memberikan gambaran bahwa keputusan ini dilatarbelakangi oleh ideologi yang sangat konservatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan modern. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara ideologi politik-religius Taliban dan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan.

Kemudian pada praktik sosial, Berita ini memaparkan situasi sosial-politik di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, yang telah mengarah pada pengurangan hak-hak perempuan secara drastis. Dalam konteks ini, penutupan akses pendidikan untuk perempuan bukan hanya mengenai kebijakan pendidikan semata, tetapi juga tentang peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi Afghanistan. Keputusan untuk menangguk pendidikan universitas perempuan dipandang sebagai bagian dari kebijakan Taliban yang lebih luas untuk mengendalikan perempuan, yang mencakup pembatasan akses ke pekerjaan, perjalanan, dan kebebasan bergerak. Selain itu, berita ini mencatat adanya perpecahan internal dalam tubuh Taliban, dengan beberapa pejabat Kabul dan anggota kelompok yang lebih moderat berharap agar pendidikan perempuan tetap dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak diambil tanpa perdebatan internal, yang memberi gambaran tentang adanya ketegangan dalam kepemimpinan Taliban itu sendiri. Dengan demikian, berita ini memberikan wawasan tentang dinamika politik internal Taliban serta bagaimana kebijakan mereka berinteraksi dengan norma-norma internasional mengenai hak perempuan.

Menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough, kebijakan Taliban yang melarang pendidikan universitas bagi perempuan di Afghanistan dapat dipahami sebagai sebuah ekspresi dari wacana yang berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan ideologis dan sosial mereka. Dalam wacana ini, Taliban membangun narasi di mana perempuan dianggap tidak layak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-

laki, sejalan dengan ideologi konservatif yang mereka anut. Kebijakan ini bukan hanya langkah politik, tetapi juga cara untuk memperkuat dominasi mereka atas kehidupan perempuan di Afghanistan, yang merupakan bagian dari upaya mereka untuk mempertahankan struktur patriarkal dalam masyarakat.

Di sisi lain, reaksi internasional, yang mencakup kecaman keras dari negara-negara Barat dan organisasi hak asasi manusia, berfungsi sebagai respons terhadap wacana dominan Taliban, memperkenalkan narasi alternatif yang mendukung kesetaraan gender dan pendidikan sebagai hak fundamental bagi semua warga negara. Ketegangan ini mencerminkan perbedaan wacana antara kekuasaan lokal Taliban yang memaksakan interpretasi mereka tentang Islam, dan norma internasional yang lebih inklusif, yang menantang ideologi mereka. Dalam hal ini, wacana Taliban juga berusaha menciptakan hegemoni dengan membentuk opini publik yang mendukung pembatasan terhadap perempuan, meskipun ada ketegangan internal di dalam tubuh Taliban yang memperjuangkan perubahan. Pada akhirnya, kebijakan ini menunjukkan bagaimana wacana digunakan untuk mengontrol identitas sosial dan memperkuat ketimpangan gender, sementara wacana internasional mencoba membuka ruang bagi perlawanan terhadap kekuasaan yang menghambat hak-hak perempuan di Afghanistan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis bagaimana media global mengangkat isu kesetaraan gender perempuan Afghanistan, dengan penekanan pada analisis berbasis interseksionalitas. Berdasarkan berita dari berbagai media internasional seperti BBC, The Guardian, Al Jazeera, dan CNN, dapat disimpulkan bahwa perempuan Afghanistan menghadapi diskriminasi berlapis yang tidak hanya berkaitan dengan gender, tetapi juga diperburuk oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang saling berinteraksi. Interseksionalitas dalam konteks perempuan Afghanistan menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap mereka bukanlah fenomena tunggal. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Taliban, seperti larangan bekerja di NGO, pembatasan pendidikan, dan penghapusan hak-hak dasar lainnya, menambah lapisan kesulitan yang dihadapi perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelas sosial bawah, etnis minoritas, atau wilayah terpencil. Dampaknya sangat besar, baik dari segi sosial, psikologis, maupun ekonomi.

Perempuan yang kehilangan akses terhadap pendidikan atau pekerjaan di sektor NGO menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat, terutama dalam hal kesehatan mental dan ketergantungan ekonomi. Selain itu, perempuan yang berada di garis depan perlawanan, seperti aktivis dan pemrotes, berisiko menghadapi kekerasan dan intimidasi. Di sisi lain,

perempuan dari daerah terpencil dan komunitas minoritas yang sudah terpinggirkan mengalami ketimpangan yang lebih tajam, di mana mereka tidak hanya dikecualikan dari pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga terisolasi dari suara mereka di ruang publik. Dalam konteks ini, media global berperan penting dalam menyoroti isu-isu ini, memberi visibilitas kepada perjuangan perempuan Afghanistan, serta mendorong dialog global mengenai pentingnya kesetaraan gender.

Melalui analisis berbasis interseksionalitas, kita dapat melihat bahwa perjuangan perempuan Afghanistan untuk kesetaraan gender adalah kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Untuk mencapai perubahan nyata, upaya global perlu melibatkan pendekatan yang lebih holistik dan sensitif terhadap lapisan-lapisan diskriminasi yang ada, serta mendukung perempuan dalam menghadapi tantangan yang berlapis ini. Dalam konteks perubahan kebijakan Taliban yang mengekang hak-hak perempuan, analisis ini menunjukkan bahwa media global berperan penting dalam membentuk persepsi internasional terhadap perempuan Afghanistan. Meskipun media berfokus pada narasi penderitaan, penting untuk menyadari bahwa perempuan Afghanistan bukan hanya korban, tetapi juga aktor yang aktif dalam perjuangan mereka untuk hak-hak mereka. Pendekatan interseksionalitas menyoroti bagaimana pengalaman perempuan yang terpinggirkan, seperti perempuan Hazara, lebih kompleks karena mereka menghadapi penindasan yang lebih berat, baik berdasarkan gender maupun etnisitas.

Sementara itu, analisis wacana kritis Fairclough menunjukkan bahwa wacana yang dibangun oleh media internasional sering kali tidak memberikan gambaran yang menyeluruh tentang resistensi dan ketahanan yang ada di Afghanistan, sehingga menimbulkan narasi yang lebih mengedepankan peran “korban” daripada “pejuang”. Meskipun upaya-upaya internasional seperti program pendidikan informal dan kampanye solidaritas digital menunjukkan adanya perhatian global, efektivitasnya dalam mendorong perubahan yang berarti tetap terhambat oleh kendala politik dan birokrasi yang ketat, baik di dalam negeri Afghanistan maupun dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, untuk memastikan perjuangan perempuan Afghanistan dapat berlanjut, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan tidak hanya media internasional tetapi juga dukungan konkret dari komunitas internasional dan solidaritas global yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Lughod, L. (2022). Do Muslim women need saving? . *American Anthropologist*, 104(3), 783-790.
- Ahmadi, B. (2021). Women under the Taliban: Losses, resilience, and resistance. . *Afghanistan Research Journal*, 45(2), 23-34.
- Altheide, D. L. (2022). Global Media Representations of Afghan Women. *Journal of Media Studies*, 15(3), 213–228.
- Amnesty International. (2023). *Afghanistan: Women under Taliban rule*. . Amnesty International.

- Amnesty International. (2023). *Reaffirming our commitment to the brave women of Afghanistan*. Amnesty International.
- Ananda, Darra., Putra, Purwanto. (2023). Analisis Framing Model Robert N. Entman Tentang Konflik Rusia Dan Ukraina Pada Media Online The Washington Post Dan Xinhua News. *Communications*, 5(2), 511–535.
<https://doi.org/10.21009/communications.5.2.5>
- BBC. (2022, December 21). *Afghanistan: Taliban ban women from universities amid condemnation*. Retrieved November 12, 2024, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-64045497>
- BBC. (2023). *Afghan women resist Taliban oppression*. Retrieved November 04, 2024, from <https://www.bbc.com>
- CARE International. (2023). *Afghanistan crisis: Impact on women and girls*. Care.
- CNN. (2022, December 20). *Taliban suspend university education for women in Afghanistan*. Retrieved November 12, 2024, from <https://edition.cnn.com/2022/12/20/asia/taliban-bans-women-university-education-intl/index.html>
- Coombs, T. W. (2015). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Coombs, T. W. (2017). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163-176.
- Cordaid International. (2022). *Women's activism in Afghanistan needs all the support it can get*. Afghanistan: Corda.
- European Union. (2024). *Afghanistan Gender Country*. Kabul: UN Women.
- European Union. (2024). *Transformative approaches to gender equality and women's empowerment in Afghanistan*. . European Union Publications.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge.
- Human Rights Watch. (2022). *Afghanistan: Girls Denied Education Under Taliban*. Human Right Watch.org.
- Meranti, M., Isa, D. E., & Silviana, I. (2024). Masters Of The Narrative: Culture And Power In Global Media's Take On Palestine-Israel Conflict. *Communications*, 6(2), 180–194. Retrieved from <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communications/article/view/45100>
- Minority Rights Group. (2022). *The plight of Hazara women in Afghanistan*. Retrieved November 09, 2024, from <https://www.minorityrights.org>
- Noor, M. (2021). Media representations of Afghan women: Between reality and Western imagination. . *Journal of Global Media Studies*, 15(1), 45-60.

- Oxfam. (2022). *Gender and Ethnic Inequality in Afghanistan*. France: Oxfam.Org.
- Siddiqi, S. (2022). Framing the Afghan women's crisis: A content analysis of Western media. *Global Media Journal*, 14(3), 210-228.
- The Guardian. (2022, December 20). *Taliban ban Afghan women from university education*. Retrieved November 12, 2024, from <https://www.theguardian.com/world/2022/dec/20/taliban-ban-afghan-women-university-education>
- The Guardian. (2022, March 05). *Zahra Joya: Fighting for women's voices in Afghanistan*. Retrieved November 02, 2024, from <https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/05/afghan-journalist-zahra-joya-among-times-women-of-the-year>
- UN Women. (2022). *Supporting Afghan women: Global advocacy and local action*. . United Nations.
- UN Women. (2023). *Advancing gender equality and women's rights in Afghanistan*. UN Women.
- UN Women. (2023). *Empowering Afghan Women Through Education and Skills*. United Nations.
- UNDP. (2023). *Economic empowerment of women in Afghanistan*. United Nations Development Programme.
- UNHCR. (2023). *Gender-sensitive protection and community development programs*. . UNHCR Publications.
- UNICEF. (2022). *For Every Child, Ever Opportunity*. . New York: UNICEF Annual Report.
- UNICEF. (2023). *Gender integration in health, education, and nutrition programs in Afghanistan*. . UNICEF Publications.
- United Nations. (2023). *The UN Strategic Framework for Afghanistan*. Kabul: United Nations.
- United Nations Population Fund. (2023). *Sexual and reproductive health rights: Support for women in humanitarian contexts*. United Nations Population Fund.
- Women's Peace and Humanitarian Fund. (2020). *Empowering women in conflict and humanitarian settings*. . Women's Peace and Humanitarian Fund.
- World Bank. (2018). *World's Bank Annual Report*. The World Bank.
- World Food Programme. (2023). *Promoting gender equality through food security programs*. World Food Programme.
- World Health Organization. (2023). *Gender, equity, and human rights: Addressing gender-based violence in health systems*. WHO.